

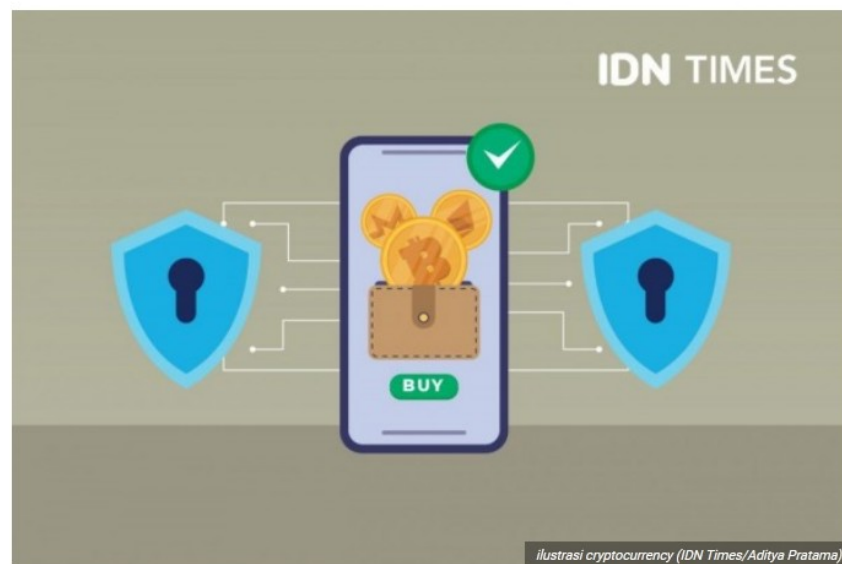
	News Title : Kripto Kena Pajak, Kepercayaan Investor Diprediksi Bakal Melesat	
	Media Name : IDNTimes.com	Journalist : Ridwan Aji Pitoko
	Publish Date : 15 April 2022	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 0
	Resources : Ibrahim Assuaibi (Direktur TRFX Garuda Berjangka)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Economy	Topic : Pajak Kripto

Business > Economy

15 Apr 22 | 11:30

Kripto Kena Pajak, Kepercayaan Investor Diprediksi Bakal Melesat

Transaksi aset kripto bakal kena pajak per 1 Mei 2022



Verified

Ridwan Aji Pitoko



Share to Facebook



Share to Twitter

Jakarta, IDN Times - Pemerintah secara resmi bakal menerapkan pengenaan pajak terhadap seluruh transaksi aset kripto per 1 Mei 2022 mendatang. Direktur TRFX Garuda Berjangka sekaligus pengamat aset kripto, Ibrahim Assuaibi pun mengapresiasi langkah pemerintah tersebut.

Menurut dia, langkah tersebut sebagai sebuah pengakuan dari pemerintah terhadap aset kripto sebagai alat komoditas yang akan diluncurkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti).

"Saya mengapresiasi pemerintah yang menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Ini merupakan tonggak awal Bappebti dan OJK akan saling mendukung dan mengawasi," kata Ibrahim, dalam keterangan resmi yang diperoleh *IDN Times*, Jumat (15/4/2022).

Baca Juga: Siap-siap! Transaksi Aset Kripto Bakal Kena Pajak per 1 Mei 2022

1. Para pedagang aset kripto diharapkan menerima aturan ini

2. Kepercayaan masyarakat akan bertambah

LANJUTKAN MEMBACA ARTIKEL DI BAWAH

Editor's Picks

- 4 Bisnis Unik Antimainstream Yang Cocok Saat Bulan Puasa
- Luhut Tinjau Proyek Kereta Cepat JKT-BDG, Uji Coba Februari 2023
- Pemerintah Cabut Izin Konsesi Kawasan Hutan 15 Perusahaan Nakal



(IDN Times/Aditya Pratama)

Di sisi lain, kehadiran PMK tersebut juga diyakini Ibrahim dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang berinvestasi pada aset kripto.

"Dengan disahkan peraturan tersebut tidak serta merta masyarakat atau investor akan meninggalkan aset kripto, tetapi ini akan menambah kepercayaan tersendiri bagi masyarakat (investor) yang saat ini sedang ramai-ramainya berinvestasi. Yang terpenting transaksi benar-benar diawasi oleh pemerintah," tutur dia.

3. Aset kripto dianggap memenuhi kriteria sebagai objek PPN

Sebelumnya diberitakan, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), Neilmaldrin Noor mengungkapkan, pemerintah memandang aset kripto sebagai komoditas yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN.

"Pertama yang harus diluruskan bahwa aset kripto di Indonesia ini tidak dianggap sebagai alat tukar maupun surat berharga, melainkan sebuah komoditas. Bank Indonesia menyatakan bahwa aset kripto bukanlah alat tukar yang sah," tutur Neil, dalam siaran pers resmi yang diterima IDN Times, Rabu (13/4/2022).

Bappebti dan Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa aset kripto merupakan komoditas. Oleh karena dianggap sebagai komoditas, maka aset kripto merupakan barang kena pajak tidak berwujud dan harus dikenai PPN juga agar tercipta keadilan.

Sebagai jenis objek pajak yang baru, pemerintah pun bakal mengupayakan penerapan aturan yang mudah dan sederhana untuk memungut pajak dari aset kripto.

Cara pengenaan pajak pada perdagangan aset kripto adalah dengan melakukan penunjukan pihak ketiga sebagai pemungut PPN perdagangan aset kripto, yaitu penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), baik dalam negeri maupun luar negeri.